RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN MUARA HARUS TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN MUARA HARUS

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Harus tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2024, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dab RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Harus beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan / sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2024.

Kami sadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentunya penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon saran dan masukan dari semua pihak. Meski demikian kami berharap dengan selesainya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Muara Harus, Agustus 2024

CAMAT MUARA HARUS

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina

NIP.19700914 199503 1 006

DAFTAR ISI

				Hal.
KATA PENGANTAR			.....	2
DAFTAR ISI			.....	3
DAFTAR TABEL			.....	4
BAB I	PENDAHULUAN		.....	5
	1.1	Latar Belakang	.....	5
	1.2	Landasan Hukum	.....	6
	1.3	Maksud dan Tujuan	.....	8
	1.4	Sistematika Penulisan	.....	9
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		.....	10
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	.....	10
		2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja tahun 2024 terhadap APBD tahun 2024	.....	10
		2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2024	.....	18
	2.2	Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	.....	25
	2.3	Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	.....	26
	2.4	Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD	.....	27
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		.....	36
BAB IV	PENUTUP		.....	48

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel	2.1	Hasil Evaluasi Kesesuaian Antara Renja Kec Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	.....	11
Tabel	2.2	Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kec. Muara Harus Tahun 2024	.....	12
Tabel	2.3	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kec. Muara Harus Sampai Triwulan II Tahun2024	.....	19
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	…..	28
Tabel	3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kec. Muara Harus Tahun 2024	…..	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan. Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Hasil pelaksanaan Renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P.652/Bappedalitbang/P2E/050/05/2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja-SKPD Tahun 2023, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Selain berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan Perubahan rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah kabupaten tabalong Nomor 09 tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran daeah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupatem Tabalong tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kab.tabalong Tahun 2024 No.06 Noreg Peraturan Daerah Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (6-82/2024)
16. Peraturan Bupati tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kab.Tabalong Th. 2024 No.19)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 disusun dengan maksud menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

2.1.1 Evaluasi kesesuaian Renja Tahun 2024 terhadap APBD Tahun 2024

2.1.1.1 Kesesuaian Program antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%, Artinya bahwa jumlah program dalam Renja sama dengan jumlah Program yang ada dalam APBD, yaitu 6 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, jumlah kegiatan dalam Renja tahun 2024 sebanyak 14 kegiatan sedangkan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD tahun 2024 yaitu ada 14 Kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Evaluasi terhadap Sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2024, Jumlah Sub Kegiatan yang ada di Renja sebanyak 30 sub kegiatan sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 30 sub kegiatan juga.

2.1.1.3 Kesesuaian Pagu Anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 sebesar, Rp. 3.166.577.054,- Sedangkan anggaran Kecamatan Muara Harus berdasarkan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.647.416.269,- Terdapat selisih anggaran antara Renja dengan APBD sebesar Rp. 480.839.215,- Seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan APBD tahun 2024

No	Uraian	Renja Tahun 2024	APBD Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Program	6	6
2.	Kegiatan	14	14
3.	Sub Kegiatan	30	30
4.	Pagu Anggaran	3.166.577.054,-	3.647.416.269,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Harus tahun 2024

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Renja 2024		APBD 2024	
								Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Target capaian kinerja	Anggaran
1						2	3	4	5	6	7
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**	**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB**	**2.910.733.539**	**BB**	**3.214.060.560**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**8 dokumen**	**9.523.860**
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	2 dokumen	2.034.460
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	1 dokumen	1.245.000
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	1 dokumen	1.245.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	1 dokumen	1.499.720
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	1 dokumen	1.500.320
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	999.530	1 dokumen	999.530

						kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	999.830	1 dokumen	999.830
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.416.328.553**	**20 dokumen**	**2.710.847.768**
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.414.453.785	15 orang/ bulan	2.708.973.000
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhit tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	2 laporan	1,274.768
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	600.000	18 laporan	600.000
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen administrasi BMD perangkat daerah**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**3 dokumen**	**1.805.976**
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	3 dokumen	1.805.976
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**154.648.829**	**100%**	**158.270.707**
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	4 paket	626.000	4 paket	642.690
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 paket	23.937.893	41 paket	23.936.765
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	9.809.700	4 paket	10.909.700
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.649.236	12 dokumen	3.645.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordnasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	116.626.000	12 laporan	119.136.5532

7	**01**	**01**	**2**	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah unit BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**4 unit**	**28.056.819**	**4 unit**	**28.933.162**
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	28.056.819	4 Unit	28.933.162
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase tersedianyan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**208.863.300**	**100%**	**209.531.052**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	27.600.000	12 laporan	27.600.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	181.263.300	12 laporan	181.931.052
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**38 unit**	**91.506.202**	**38 unit**	**95.148.035**
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	74.459.309	11 unit	78.110.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	10.361.856	26 unit	10.361.856
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6.685.037	1 unit	6.6876.179
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**67.373.285**	**80%**	**72.441.258**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**3 laporan**	**67.373.285**	**3 laporan**	**72.441.258**

7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	40.250.000	1 laporan	40.774.020
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen	27.123.285	3 dokumen	31.667.238
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur, dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**89.614.730**	**80%**	**116.194.730**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah Pemerintah desa yang dibina / diberdayakan**	**7 desa**	**17.571.000**	**7 desa**	**13.600.000**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	17.571.000	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000
7	**01**	**03**	**2**	**06**		**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**72.043.730**	**1.544 Keluarga**	**102.594.730**
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 keluarga	72.043.730	1.544 keluarga	102.594.730
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Kenyamanan)**	**100%**	**36.721.000**	**100%**	**86.930.000**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**KOORDINASI UPAYA**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**36.721.000**	**12 patroli**	**86.930.000**

						PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	36.721.000	12 laporan	86.930.000
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**44.563.500**	**80%**	**94.189.721**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**1 laporan**	**44.563.500**	**1 laporan**	**94.189.721**
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	32.078.000	300 orang	81.449.721
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12.485.500	12 dokumen	12.740.000
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**17.571.000**	**80%**	**63.600.000**

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**17.571.000**	**7 desa**	**63.600.000**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	17.571.000	12 dokumen	63.600.000
Total									**3.166.577.054**		**3.647.416.269**

Berdasarkan data perbandingan antara Renja tahun 2024 dan APBD Tahun 2024 pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuain program sebesar 100%, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100% dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100%. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih ada yang belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja tahun 2024.Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaharuinya indikator dan target Renja tahun 2024 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2024

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2.3

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024		Realisasi capaian target program/kegiatan/sub kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**					**KECAMATAN**							
7	01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai AKIP**	**3.214.060.560**	**BB**				
7	01	**01**	2	**01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**9.523.860**	**8 dokumen**	**1.280.000**	**13,44%**	**50%**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.034.460	2 dokumen	**680.000**	**33,42%**	**50%**	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.245.000	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.245.000	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.499.720	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.500.320	1 dokumen	**0**	**0**	**0**	

							Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
7	01	01	2	02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.530	1 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.830	1 laporan	**600.000**	**60,01%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2.710.847.768**	**20 dokumen**	**1.344.037.584**	**49,61%**	**50%**	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.708.973.000	15 orang/bulan	**1.344.037.584**	**49,61%**	**50%**	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.768	2 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600.000	18 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	**01**	2	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang milik daerah yang disusun**	**1.805.976**	**3 dokumen**	**0**	**0**	**0**	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Kebutuhan Barang Milik daerah yang disusun	1.805.976	3 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	**01**	2	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**158.270.707**	**100%**	**114.067.177**	**72,07%**	**50%**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen	642.690	4 paket	0	**0**	**0**	

						listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan						
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23.936.765	41 paket	300.000	**1,25%**	**50%**	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.909.700	4 paket	0	**0**	**0**	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.645.000	12 dokumen	1.950.000	**53,50%**	**50%**	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordnasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.136.552	12 laporan	111.817.177	**93,86%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah alat yang dibeli**	**28.933.162**	**4 Unit**	**17.477.477**	**60,41%**	**50%**	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28.933.162	4 unit	**17.477.477**	**60,41**	**50%**	
7	01	**01**	2	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**209.531.052**	**100 %**	**78.132.478**	**37,29%**	**50%**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27.600.000	12 laporan	**8.392.478**	**30,41%**	**50%**	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	181.931.052	12 laporan	**69.740.000**	**38,33%**	**50%**	
7	01	**01**	2	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**95.148.035**	**28 unit**	**23.195.000**	**24,38%**	**50%**	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78.110.000	11 unit	20.875.000	**26,73%**	**50%**	

						jabatan							
97	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.361.856	26 unit	2.320.000	**22,39%**	**50%**	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6.676.179	1 unit	0	**0**	**0**	
7	01	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**72.441.258**	**80%**	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	**02**	2	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**72.441.258**	**4 laporan**	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.774.020	1 laporan	**0**	**0**	**0**	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.667.238	3 dokumen	**5.310.000**	**16,77%**	**50%**	
7	01	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**116.194.730**	**80%**	**17.500.000**	**15,06%**	**50%**	
7	01	**03**	2	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**13.800.000**	**7 desa**	**7.200.000**	**52,17%**	**50%**	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.800.000	7 lembaga kemasyarakatan	7.200.000	52,17%	50%	
7	01	03	2	06		**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**102.594.730**	**1.544 Keluarga**	**10.300.000**	**10,04%**	**50%**	

						TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN							
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.594.730	1.544 Keluarga	10.300.000	10,04%	50%	
7	01	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**86.930.000**	**100%**	**19.850.000**	**22,83%**	**50%**	
7	01	**04**	2	**01**		**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**86.930.000**	**12 patroli**	**19.850.000**	**22,83%**	**50%**	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.930.000	12 laporan	19.850.000	22,83%	50%	
7	01	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**94.189.721**	**80%**	**975.000**	**1,04%**	**50%**	
7	01	**05**	2	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**94.189.721**	**1 laporan**	**975.000**	**1,04%**	**50%**	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	81.449.721	300 orang	**975.000**	**1,20%**	**50%**	

						tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.740.000	12 dokumen	**0**	**0**	**0**	
7	01	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**63.600.000**	**80%**	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
7	01	**06**	2	**02**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**63.600.000**	**7 desa**	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63.600.000	12 dokumen	**14.400.000**	**22,64%**	**50%**	
Total								**3.647.416.269**		**1.636.224.716**	**44,86%**	**50%**	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II di atas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil renja Perangkat daerah sesuai format evaluasi Renja dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengindentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Muara harus telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.636.224.716,- Atau sekitar 44,86% persen dari total anggaran untuk tahun 2024.Pencapaian realisasi anggaran Triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, di antaranya yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
   - Sub kegiatan Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
   - Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republok Indonesia

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kabupaten / Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Pelayanan pada kecamatan Muara Harus secara rinci adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Menggordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah
- Mengoordinasika pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daaerah kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada di kecamatan

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas di antaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan .Berdasarkan data ada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yeng perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai Triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2024 belum seluruhnya selaras dengan perubahan Renstra 2019-2024 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja

2024 dilakukan sebelum ditetapkannya Perubahan Renstra, dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra

- Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai
- Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang IKM, di antaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Harus tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, yang dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Harus dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan
2. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
3. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Muara Harus, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Reviu terhadap rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hasil reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2024

No	Rancangan RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec.Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec.Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	
1.	**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dokumen	1.499.720	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1.499.720	

			SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	
2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.904.525.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.904.525.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan JAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	600.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	600.000	

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	
	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.806.976	
4	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Muara Harus**	**Jumlah administrasi kepegawaian yang disediakan**	**15 paket**	**16.650.000**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec. Muara harus**	**Jumlah administrasi kepegawaian yang disediakan**	**15 Paket**	**16.650.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	16.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	16.650.000	
5	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	
6	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 Unit**	**65.209.226**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 Unit**	**65.209.226**	
	Pengadaan Mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.036.364	Pengadaan Mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4.036.364	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.945.587	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.945.587	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.227.275	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.227.275	
7	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**214.371.052**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**214.371.052**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.600.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	186.771.052	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	186.771.052	
8	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	105.930.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	105.930.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	10.361.856	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	10.361.856	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	
9	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 laporan	86.023.140	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	86.023.140	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	

C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**123.166.730**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa**	**80%**	**123.166.730**	
10	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	
11	**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Kec. Muara harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**Kec. Muara Harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarg Berkualitas	Kec. Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarg Berkualitas	Kec. Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	
12	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**88.170.000**	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 patroli**	**88.170.000**	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.170.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.170.000	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	
13	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	
	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	129.521.633	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 oramg	129.521.633	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Muara Harus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Muara Harus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	

F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	
14	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	
Total Pagu Rancangan RKPD					**4.181.626.269**	**Total Pagu Perubahan**				**4.181.626.269**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program – program Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong pada Anggaran Perubahan tahun 2024 melaksanakan 6 (Enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan dan 33 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tabalong. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Evaluasi kinerja Perangkat daerah

   Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

   Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah

   Sub Kegiatan : - Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD

   Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

   Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

   Kegiatan : 6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya

Kegiatan : 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program 2 : Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

   Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

   Sub Kegiatan :

   - Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
   - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

3. Program 3 : Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

   Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

   Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

   Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan keluarga berkualitas

4. Program 4 : Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

   Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

   Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

5. Program 5 : Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

   Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

   Sub Kegiatan :

   - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program 6 : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

Rencana Kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1 Perubahan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Tahun 2024

Kode						Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan progam / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi detail	Rencana tahun 2024 (sebelum perubahan)							Rencana tahun 2024 (setelah perubahan)				Catatan penting
									Renja 2024			APBD 2024			Perubahan renja				
								Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**					**KECAMATAN**													
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA**	**Kec Muara Harus**	**Nilai AKIP**	**BB**	**2.910.733.539**	**PAD**	**BB**	**3.214.060.560**	**PAD**	**Nilai AKIP**	**BB**	**3.636.177.528**	**PAD**	
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	**Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**9.523.860**	**PAD**	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	PAD	2 dokumen	2.034.460	PAD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.034.460	PAD	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	1 dokumen	1.245.000	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	1 dokumen	1.245.000	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.245.000	PAD	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	PAD	1 dokumen	1.499.720	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.499.720	PAD	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	PAD	1 dokumen	1.500.320	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.320	PAD	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	PAD	1 laporan	999.530	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	999.530	PAD	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	PAD	1 laporan	999.830	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	999.830	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat**	**20 dokumen**	**2.416.328.553**	**DAU**	**20 dokumen**	**2.710.847.768**	**DAU**	**Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang**	**20 dokumen**	**2.906.399.768**		

								daerah yang disusun							**disusun**			
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	2.414.453.785	DAU	15 orang/ bulan	2.708.973.000	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	2.904.525.000	DAU	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	PAD	2 laporan	1.274.768	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.274.768	PAD	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	600.000	PAD	18 laporan	600.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	600.000	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	**Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun**	**3 dokumen**	**1.805.976**	**PAD**	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	**Kec Muara Harus**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	PAD	3 dokumen	1.805.976	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	1.805.976	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**15 paket**	**16.650.000**	**PAD**	

7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec Muara Harus	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	16.650.000	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**154.648.829**	**PAD**	**100%**	**158.270.707**	**PAD**	**Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah**	**100%**	**259.278.577**	**PAD**	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	626.000	PAD	4 paket	642.690	PAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	642.690	PAD	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	23.937.893	PAD	41 paket	23.936.765	PAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	27.086.635	PAD	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	9.809.700	PAD	4 paket	10.909.700	PAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.909.700	PAD	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.649.236	PAD	12 dokumen	3.645.000	PAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.845.000	PAD	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	116.626.000	PAD	12 laporan	119.136.552	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.794.552	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah alat yang dibeli**	**4 unit**	**28.056.819**	**PAD**	**4 unit**	**28.933.162**	**PAD**	**Jumlah alat yang dibeli**	**8 unit**	**65.209.226**	**PAD**	

						DAERAH												
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kec Muara Harus	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	4.036.364	PAD	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	28.056.819	PAD	4 unit	28.933.162	PAD	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	35.945.587	PAD	
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	25.227.275	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**208.863.300**	**PAD**	**100%**	**209.531.052**	**PAD**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**214.371.052**	**PAD**	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	27.600.000	PAD	12 laporan	27.600.000	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	27.600.000	PAD	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	181.263.300	PAD	12 laporan	181.931.052	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	186.771.052	PAD	
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**91.506.202**	**PAD**	**28 unit**	**95.148.035**	**PAD**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**28 unit**	**162.939.069**	**PAD**	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	**Kec Muara**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	11 unit	74.459.309	PAD	11 unit	78.110.000	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	11 unit	105.930.000	PAD	

						pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	**Harus**	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	**Kec Muara Harus**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	10.361.856	PAD	16 unit	10.361.856	PAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	10.361.856	PAD	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	**Kec Muara Harus**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6.685.037	PAD	1 unit	6.676.179	PAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	46.647.213	PAD	
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Muara Harus**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**67.373.285**	**PAD**	**80%**	**72.441.258**	**PAD**	**Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan**	**80%**	**130.820.378**	**PAD**	
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**67.373.285**	**PAD**	**4 laporan**	**72.441.258**	**PAD**	**Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**4 laporan**	**130.820.378**	**PAD**	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	**Kec Muara Harus**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	40.250.000	PAD	1 laporan	40.774.020	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	86.023.140	PAD	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	27.123.285	PAD	3 dokumen	31.667.238	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	44.797.238	PAD	
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Kec Muara**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata**	**80 %**	**89.614.730**	**PAD**	**80%**	**116.194.730**	**PAD**	**Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan**	**80%**	**123.166.730**	**PAD**	

						KELURAHAN	**Harus**	**kelola kewilayahan desa**							**desa**			
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**17.571.000**	**PAD**	**7 desa**	**13.600.000**	**PAD**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan**	**7 desa**	**13.600.000**	**PAD**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Muara Harus**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	17.571.000	PAD	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	13.600.000	PAD
7	01	03	2	06		**Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**72.043.730**	**PAD**	**1.544 Keluarga**	**102.594.730**	**PAD**	**Jumlah keluarga yang diberdayakan dan disejahterakan**	**1.544 Keluarga**	**109.566.730**	**PAD**
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Kec Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 keluarga	72.043.730	PAD	1.544 keluarga	102.594.730	PAD	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	109.566.730	PAD
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**36.721.000**	**PAD**	**100%**	**86.930.000**	**PAD**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)**	**100%**	**88.170.000**	**PAD**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 Patroli**	**36.721.000**	**PAD**	**12 Patroli**	**86.930.000**	**PAD**	**Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan**	**12 Patroli**	**88.170.000**	**PAD**
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,	Kec Muara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	36.721.000	PAD	12 laporan	86.930.000	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	88.170.000	PAD

						dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Harus	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Muara Harus**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**44.563.500**	**PAD**	**80%**	**94.189.721**	**PAD**	**Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu**	**80%**	**145.291.633**	**PAD**	
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**44.563.500**	**PAD**	**1 laporan**	**94.189.721**	**PAD**	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**1 laporan**	**145.291.633**	**PAD**	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara repubik Indonesia tahun1945,pelestarian Bhinekka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kec Muara Ha**rus**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	32.078.000	PAD	300 orang	81.449.721	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	129.521`.633	PAD	
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Muara Ha	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12.485.500	PAD	12 dokumen	12.740.000	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	15.770.000	PAD	
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**17.571.000**	**PAD**	**80%**	**63.600.000**	**PAD**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**80%**	**58.000.000**	**PAD**	

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Muara Harus**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**17.571.000**	**PAD**	**7 desa**	**63.600.000**	**PAD**	**Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi**	**7 desa**	**58.000.000**	**PAD**	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	**Kec Muara Harus**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	17.571.000	PAD	12 dokumen	63.600.000	PAD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	58.000.000	PAD	
Total										**3.166.577.054**			**3.647.416.269**				**4.181.626.269**		

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Perubahan Rencana Kerja (Renja Kecamatan Muara Harus Kabupaten TabalongTahun 2024 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong tahun 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Catatan penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada perubahan Renja Kecamatan Muara harus tahun 2024 antara lain :

- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan renja Kecamatan Muara Harus, pada prinsipnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabalong
- Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini berpedoman pada perubahan Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada renstra
- Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini juga berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2024.

b. Kaidah pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

- Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus tahun 2024
- Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan DPRD Kabupaten Tabalong

c. Rencana Tindak lanjut

   Rencana tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dokumen Renja Kecamatan Muara harus tahun 2024 setiap triwulannya
- Prrogram, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Muara Harus akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Muara Harus, Agustus 2024

CAMAT MUARA HARUS

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina

NIP.19700914 199503 1 006